

Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe

Innovative Leadership and Digital Village Governance: A Case Study of Biangloe Village

Muhammad Amin Rais^{1*}, Muhammad Akmal Ibrahim², Suryadi Lambali²

¹ Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

² Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

*E-mail: muhammadaminraisunhas@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: *innovation capacity; village innovation; digital village; innovative leadership; eGovernment*

Kata kunci:

kapasitas inovasi; inovasi desa; desa digital, kepemimpinan inovatif; eGovernment

How to cite:

Rais, M. A., Ibrahim, M. A., & Lambali, S. (2024). Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 10(1), 18-39

ABSTRACT

This research analyzes the innovation capacity in the implementation of Digital Village Governance in Desa Biangloe, Bantaeng Regency. The study assesses the extent to which the village government can adopt and implement the Digital Village Governance Innovation (Tak Pergi) in Desa Biangloe, Bantaeng Regency, with a focus on innovative leadership, team quality, system/structure, and external influence management. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection is carried out through observation and in-depth interviews with informants consisting of the Village Secretary, application operators, village facilitators, village heads, and community members who have used the Digital Village Governance Innovation (Tak Pergi). Data analysis involves data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The research findings indicate that the Digital Village Governance Program (Tak Pergi) in Desa Biangloe, Bantaeng, receives strong support from the village government, Village Consultative Body (BPD), and the community, with funding from the Village Budget (APBDes) and the community. Although the regulations for village heads and the application usage SOP are not yet finalized, there is a strong commitment from the village government. The BPD is involved in socialization and regular evaluation, but there is a need for improved community outreach. The system is organized and supports Sustainable Development Goals (SDGs), but formalizing cooperation still needs improvement. It is recommended to finalize regulations, enhance education through socialization, and formalize cooperation.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kapasitas inovasi dalam implementasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital yang merupakan sebuah inovasi tatakelola pemerintahan desa digital di Desa Biangloe,

Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pemerintah desa mampu mengadopsi dan mengimplementasikan Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng, dengan fokus kepemimpinan inovatif, kualitas tim kerja, sistem/struktur dan pengelolaan pengaruh dari luar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari Seketaris desa, operator aplikasi, pendamping desa, kepala dusun, serta masyarakat yang telah menggunakan inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi). Analisis data melalui tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Bantaeng, didukung kuat oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta didanai oleh APBDes dan komunitas. Meski regulasi kepala desa dan SOP penggunaan aplikasi belum final, terdapat komitmen kuat dari pemerintah desa. BPD ikut terlibat dalam sosialisasi dan evaluasi rutin, tetapi perlu peningkatan sosialisasi kemasyarakat. Sistemnya terorganisir dan mendukung SDGs, tetapi formalisasi kerja sama masih perlu ditingkatkan. Direkomendasikan untuk menyelesaikan regulasi, meningkatkan edukasi melalui sosialisasi, dan memformalkan kerja sama.

Pendahuluan

Inovasi menandakan perubahan yang melangkah ke sesuatu yang sepenuhnya baru. Perubahan ini memiliki makna yang sangat beragam dan dapat diimplementasikan dengan strategi yang direncanakan atau secara disengaja (Choi & Majumdar 2015; Kushadajani & Permana, 2020). Salah satu jenis inovasi yang sangat penting adalah inovasi dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah. Pentingnya inovasi ini diwujudkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan inovasi.

Inovasi dalam Pemerintahan Daerah mencakup sejumlah jenis pembaruan, seperti peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, dan orientasi pada kepentingan masyarakat serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Brinkerhoff & Wetterberg 2013, Speer 2012, Said 2015). Peningkatan efisiensi merujuk pada optimalisasi penggunaan sumber daya, baik melalui penerapan teknologi baru, redesi proses untuk mengurangi pemborosan, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, peningkatan efektivitas bertujuan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, misalnya melalui perubahan dalam pengambilan keputusan atau alokasi sumber daya. Peningkatan kualitas layanan mencakup perbaikan dalam cara pelayanan disampaikan atau jenis layanan yang ditawarkan, dengan tujuan memenuhi atau melebihi harapan masyarakat.

Selain itu, orientasi pada kepentingan masyarakat dan transparansi serta akuntabilitas juga menjadi prinsip penting dalam inovasi pemerintahan daerah. Orientasi pada kepentingan masyarakat menegaskan bahwa semua inovasi harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau penggunaan umpan balik masyarakat dalam pembuatan kebijakan (Woolf et al., 2016, Yudarwati & Gregory 2022). Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa proses dan hasil inovasi dipublikasikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk dalam hal informasi tentang perubahan yang akan dilakukan dan dampak dari perubahan tersebut (Rakova et al 2021, Regan 2021, Merhi 2022).

Konsep inovasi menjadi isu krusial dalam bidang administrasi publik ketika paradigma *New Public Management* (NPM) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salah satu prinsip pokok dari NPM adalah kompetisi, di mana organisasi publik dituntut untuk menghadirkan metode yang kreatif dan lebih efisien dalam mengatasi persoalan-persoalan publik yang semakin kompleks melalui inovasi (Abdullah, 2016).

Dalam konteks pembangunan desa, inovasi sangat penting untuk mendorong perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, banyak desa di Indonesia masih menghadapi ketidakseimbangan dalam pembangunan, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia. Keterbatasan kapasitas menjadi hambatan utama, dan dana desa harus dikelola dengan kreativitas dan inovasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Rahayu & Budi 2006; Darmi 2015; Prayitno & Subagiyo 2018; Banga, 2018).

Inovasi Tata kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) merupakan inovasi tatakelola pemerintah dengan konsep digital. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik di desa Biangloe sendiri dibuatlah inovasi yang diberi nama Tata kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) dimana inovasi ini menggunakan aplikasi WebGIS atau biasa disebut *quantum geographic information system* dan berbasis *off line* sehingga untuk penggunaannya tidak menggunakan jaringan dimana langkah awalnya adalah melakukan pemetaan geo spasial dan pendataan sosial untuk kemudian di *input* kedalam aplikasi. *Output* dalam penggunaannya adalah pertama mempermudah pemerintah desa dalam proses perencanaan. Kedua mempermudah desa dalam proses pengambilan keputusan sehingga memaksimalkan kinerja perangkat desa dalam hal ini kepala urusan tata usaha dan umum dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Dengan pencapaian tersebut implementasi Tata kelola Pemerintahan Desa Digital atau disingkat 'Tak Pergi' ini akan menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik sehingga diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam mengimplementasikan inovasi "Tak Pergi" kepemimpinan inovatif sangat diperlukan. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan inovasi dan komitmen untuk menjaga serta menyebarkan inovasi tersebut akan mempengaruhi kesuksesan program (Kim et al., 2007). Namun, kerentanan terletak pada ketidakpastian kepemimpinan yang bisa berubah setiap periode pemilihan kepala

desa, sehingga stabilitas dan strategi pimpinan desa perlu dipertimbangkan dalam menjaga kelangsungan inovasi.

Maka penelitian kapasitas inovasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana pemerintah mampu mengadopsi dan mengimplementasikan program inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintahan. Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) Desa Biangloe dianalisis untuk melihat bagaimana kepemimpinan inovatif, kualitas tim kerja, sistem/struktur dan pengelolaan pengaruh dari luar.

Kajian Literatur

Inovasi

Inovasi dalam manajemen sektor publik, seperti yang dinyatakan oleh Sangkala (2013), adalah pembentukan kebijakan baru dan standar operasional baru yang diperkenalkan oleh suatu organisasi untuk menangani permasalahan kebijakan publik. Hal ini melibatkan kreativitas dan respons unik terhadap isu-isu baru atau pendekatan baru terhadap permasalahan yang telah ada. Inovasi ini bukanlah penyelesaian mutlak atau sempurna, melainkan solusi fleksibel yang dapat diubah oleh mereka yang menerapkannya. Bartos (2003) memahami inovasi dalam sektor publik sebagai perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang menghasilkan peningkatan dalam layanan atau output kualitas atau kuantitas oleh organisasi. Dalam konteks lebih spesifik, Yogi (2016) mendefinisikan inovasi dalam layanan publik sebagai upaya dan pencapaian dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Hal ini dicapai melalui inisiatif dan implementasi metode, teknik, atau alat baru dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Namun, inovasi dalam pelayanan publik tidak selalu berarti pelanggaran atau penyimpangan dari prosedur yang telah ada. Alih-alih, inovasi harus dipahami sebagai upaya untuk menafsirkan dan menyesuaikan aturan-aturan dengan konteks dan situasi lokal. Inovasi dalam konteks ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik tetap relevan, responsif, dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berlangsung. Sangkala (2013) juga menekankan bahwa inovasi akan memandu organisasi pemerintah menuju perubahan organisasi dalam lingkungan yang dinamis. Mengembangkan budaya inovasi akan membawa organisasi menuju fleksibilitas, yang penting untuk modernisasi program di sektor publik. Inovasi bukan hanya tentang teknologi itu sendiri, tetapi lebih pada bagaimana kita mengadaptasi organisasi, pegawai, dan tempat pembelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)* (2006), inovasi dalam administrasi publik dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau tipe, termasuk inovasi institusional, inovasi organisasi, inovasi proses, dan inovasi konseptual. Sedangkan menurut Rogers (2014), beberapa atribut penting dari inovasi termasuk keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Robbins (2013) menambahkan bahwa inovasi memiliki ciri-ciri kekhasan, kebaruan,

program terencana, dan tujuan yang jelas. Halvorsen et al. (2005) dan Mulgan & Albury (2003) juga memberikan pandangan mereka mengenai berbagai jenis dan karakteristik inovasi dalam sektor publik.

Kapasitas Inovasi

Konsep kunci dalam memahami pentingnya kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dapat ditelusuri melalui teori pengembangan kapasitas yang diperkenalkan oleh Grindle (1997) yang menjelaskan bahwa kapasitas melibatkan tiga dimensi yaitu (1) dimensi sumberdaya manusia; (2) dimensi organisasi; dan (3) dimensi reformasi kelembagaan. Masing-masing dimensi tersebut mempunyai fokus dan upaya tertentu untuk pengembangan kapasitasnya. Dapat dipahami bahwa dimensi sumberdaya manusia berfokus pada ketersediaan personil yang profesional dan memiliki kemampuan teknis. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah yang perlu diambil antara lain: pelatihan, penentuan gaji/upah, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan sistem rekrutmen yang tepat. Pada dimensi organisasi, fokusnya ditujukan pada sistem manajemen yang memperbaiki fungsi dan tugas yang ada serta pengaturan struktur mikro. Aktivitas yang perlu dilakukan termasuk penataan sistem insentif, pemanfaatan personel, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial.

Sehubungan dengan dimensi reformasi kelembagaan, perhatian perlu diberikan pada perubahan sistem dan institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Ini melibatkan aktivitas seperti melakukan perubahan "aturan main" dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan perkembangan masyarakat sipil.

Gabries, et al. (2009), menyebutkan bahwa pengelolaan inovasi sangat ditentukan oleh tiga faktor strategis yaitu pertama, kepemimpinan yang kredibel. Pemimpin yang kredibel memiliki keterampilan dan perilaku yang dapat dipelajari, dipraktekkan dan digunakan untuk mencapai kinerja organisasi yang tinggi. Kedua, faktor adanya tim manajemen yang kuat, yaitu struktur birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan efisien. Faktor strategis ketiga adalah fungsi dari badan pemerintahan, yang melibatkan lembaga perwakilan warga dalam merumuskan kebijakan strategis.

Terakhir, Kim, et al. (2007) mengembangkan model kapasitas manajemen dan inovasi pemerintahan yang terdiri dari empat dimensi yaitu: (1) kepemimpinan inovatif, yang memiliki kemampuan dan komitmen inovasi; (2) kualitas tim kerja, yaitu kualitas aparatur yang memiliki kompetensi dan keterampilan profesional; (3) sistem/struktur, yang melibatkan sistem organisasi dan struktur organisasi yang mendukung program inovasi; dan (4) pengelolaan pengaruh dari luar. Masing-masing dimensi dalam model kapasitas manajemen inovasi pemerintahan tersebut memiliki prasyarat tertentu untuk mendukung dimensi tersebut. Kapasitas inovasi ini menentukan sejauh mana pemerintah mampu mengadopsi dan mengimplementasikan program inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah struktur organisasi lokal yang memiliki otonomi dalam mengelola dan mengurus kehidupan masyarakatnya (Sugiman 2018; Pamungkas 2019). Kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah desa umumnya terbatas dan terkendala oleh hukum dan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan nasional (Sufianto 2020; Patarai 2020).

Mathew (2013) seorang ahli pemerintahan lokal di India, mendefinisikan pemerintah desa sebagai lembaga demokratis terendah yang memberdayakan warga desa untuk mengatur urusan mereka sendiri. Ahli hukum Gargan (2018) merujuk pada pemerintah desa sebagai bentuk pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan urusan lokal yang penting untuk masyarakat setempat. Manor (2000), yang mengkhususkan diri dalam studi pemerintahan desentralisasi, melihat pemerintah desa sebagai saluran bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik.

Program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi)

Inovasi Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) diperkenalkan oleh Pemerintah Desa Biangloe untuk mengatasi masalah administrasi yang buruk, data yang tidak standar, dan terbatasnya informasi tentang potensi desa. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui digitalisasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, pemetaan geospasial, dan ketersediaan informasi desa yang berkesinambungan.

Kontribusi inovasi ini terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup pendidikan berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, pembangunan infrastruktur yang tahan lama, dan penguatan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan memperkuat lembaga-lembaga desa untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

Dalam pelaksanaan inovasi ini, terdapat beberapa tahapan seperti pembentukan tim inovasi, penyiapan anggaran, pengadaan peralatan, pendataan, verifikasi data, dan penyajian data dalam format digital. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan kemajuan dan efektivitas inovasi (Queiroz, 2020). Sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini berasal dari sumber daya lokal Desa Biangloe, anggaran desa, serta peralatan teknologi seperti *laptop, drone, GPS*, dan kamera.

Dalam rangka memastikan capaian inovasi dapat di ketahui termasuk menilai keberhasilan implementasi maka dilaksanakan kegiatan evaluasi (Meyers et al., 2012) yakni rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang ada di Desa. Pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan pertiga bulan dengan membahas persoalan terkait dengan implementasi inovasi yang berkaitan dengan kesiapan SDM, penganggaran, sarana dan prasarana. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Desa terkait inovasi, pemerintah desa bekerjasama dengan

Badan Permusyaratan Desa (BPD) mengoptimalkan posko aspirasi dan pengaduan. BPD yang secara langsung melakukan penggalian aspirasi kepada warga desa dan hasil dari penggalian tersebut disampaikan kepada pemerintah desa untuk di tindaklanjuti. Adapun hasil dari Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Capaian Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi)

No	Uraian	Sebelum	Sesudah	
		2019	2020	2021
1	Ketersediaan Aplikasi	Tidak Ada	Ada tetapi Belum Dioperasikan	Ada dan sudah bisa dioperasikan
2	Ketersediaan data	Ada tetapi tidak lengkap (70%)	Ada lengkap (80%)	Ada dan telah diupdate (100%)
3	Perencanaan	Perencanaan Secara Manual	Sudah digital	Digital dan teruji secara publik
4	Pengambilan keputusan	Belum ada dasar yang kuat	Sudah ada dasar yang kuat	Dasar yang kuat dan bisa dianalisis

Sumber: Kantor Desa Biangloe, 2023

Pada kolom ketersediaan aplikasi yang dimaksud adalah penguraian antara pemetaan geospasial dan pendataan sosial. Pada Kolom ketersediaan data adalah penyajian data yang terdiri dari beberapa indikator, diantaranya sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan kewilayahan. Pada kolom pengambilan keputusan sebelum ada inovasi, pemerintah desa dalam ini Kepala Desa dan perangkat Desa sulit mengambil keputusan yang tepat karna tidak didukung oleh data yang kuat sebagai dasar untuk menganalisa. Setelah adanya Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi), Pemerintah Desa lebih mudah dalam mengambil keputusan karena didukung oleh data yang akurat untuk dianalisis.

Tindakan pencegahan dan respons terhadap Covid-19 juga diimplementasikan dalam inovasi ini, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh seluruh tim. Aplikasi ini digunakan untuk membuat peta sebaran warga yang terdampak Covid-19 dan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sasaran vaksinasi melalui penyajian peta sebaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis dan memahami Inovasi Tata kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena dan menggambarkan kenyataan dari

kejadian yang diteliti. Data primer diperoleh melalui observasi mendalam dan wawancara dengan dua kelompok informan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Unsur Pemerintah	Jumlah Informan
1	Sekretaris Desa	1 orang
2	Kepala Dusun	2 orang
3	Tim Aplikasi	2 orang
4	Badan Permusyawaratan Desa	1 orang
5	Pegawai Pusekesmas	2 orang
6	Pendamping Desa	2 orang

No	Unsur Non-Pemerintah:	Jumlah
1	Masyarakat umum	3 orang
2	Masyarakat yang pernah menggunakan aplikasi	2 orang

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang relevan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kapasitas kepemimpinan dalam komitmennya menjaga Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini tetap ada dan membantu pelayanan public serta bagaimana strategi dan stabilitas dari pimpinan desa Biangloe.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Desa Biangloe dipilih karena telah mengimplementasikan program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) dan merupakan daerah dengan konteks lokal yang unik dan progresif dalam penerapan inovasi. Penelitian dilakukan dari bulan awal Juni 2023 sampai pada akhir bulan Juli 2023. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan mengabstraksikan informasi dan menginterpretasikan gejala dan temuan penelitian. Dalam proses analisis, terdapat tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis Inovasi Tata kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) melalui lensa Kepemimpinan Inovatif, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Kim, et al. (2007). Studi ini bertujuan untuk memahami apakah kepala desa atau pemimpin lokal lainnya menunjukkan komitmen untuk mendorong inovasi, sebagaimana dibuktikan oleh kebijakan, pendanaan, dan

inisiatif khusus mereka. Melalui fokus ini, penelitian ini mendalami kapasitas kepemimpinan lokal desa untuk mendorong perubahan inovatif dalam model tata kelolanya.

Kepemimpinan Inovatif

Kepemimpinan inovatif dalam kapasitas inovasi meliputi Perencanaan strategis, Komitmen kepemimpinan dan Stabilitas kepemimpinan. Adapun dalam Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) desa Biangloe, kapasitas kepemimpinan ini meliputi perencanaan program pada tingkat desa. Dimana setiap program harus dirumuskan terlebih dahulu pada APBDes. Adapun program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini telah di programkan, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Biangloe, informan RH:

“Program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini sudah kita masukkan dalam program pada APBDes. Sehingga anggarannya disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Mengingat data ini diperbarui setiap tahun, kita selalu mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk biaya pembaruan data dan penginputan data tersebut” (14/06/2023)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) adalah sebuah inisiatif yang telah diresmikan dan disertakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, pendanaan untuk pembuatan dan operasional dari program ini sepenuhnya berasal dari APBDes. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Biangloe, NS:

“Kalau soal perencanaan dan anggaran program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) itu sudah dibicarakan oleh BPD dan tokoh masyarakat. Jadi memang dari awal kita bicarakan untuk sampai kepada rencana kerja pemerintah (RKP) Desa” (13/07/2023)

Ini mengindikasikan bahwa Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) telah didiskusikan secara mendalam dengan BPD dan tokoh masyarakat sebelum disetujui sebagai program desa melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Oleh karena itu, dalam hal perencanaan, Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini telah menjadi program resmi pemerintah desa Biangloe.

Terkait komitmen kepemimpinan dalam menjalankan program ini, ini telah ditunjukkan sejak tahap perumusan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Biangloe, RH:

“Jadi, inisiatif ini sejatinya berasal dari pemerintah desa. Dalam rangka merumuskan inisiatif ini, beberapa tokoh dan BPD diundang untuk mendiskusikan hal ini dan sepakat bahwa perlu menciptakan inovasi. Namun, pada saat itu belum ada nama yang ditetapkan. Baru satu minggu setelahnya, kepala desa menemukan nama yang sesuai, yaitu 'Tak Pergi singkatan dari Tata Kelola Pemerintahan Desa Digital'. Itulah yang kini kita kelola” (14/06/2023)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa memberikan ruang kepada semua pihak baik itu BPD maupun tokoh masyarakat dalam perumusan program ini. Sehingga aspirasi masyarakat di akomodir, Adapun dalam penamaannya merupakan saran kepala Desa yang disepakati Bersama yakni Tata Kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi). Dalam hal anggaran, komitmen itu ditandai dengan pengalokasian anggaran APBes untuk program ini. Hal ini dijelaskan dengan baik oleh informan DA, Admin Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi):

“Awal pembuatan aplikasi dan pengembangannya tentu membutuhkan biaya. Hingga saat ini telah menghabiskan biaya hingga Rp54.200.000 dan anggarannya berasal dari APBDes karena aplikasi ini merupakan bagian dari sistem pemukhtahiran data desa” (16/06/2023)

Hal ini menandakan bahwa alokasi anggaran yang disiapkan bersumber APBDes. Adapun biaya program dari pembuatan hingga operasional yakni Rp54.200.000, Dalam hal komitmen anggaran, sudah terpenuhi dengan penganggaran yang bersumber dari APBDes, Adapun komitmen lain yang tak kalah pentingnya yakni pada regulasi. Adapun komitmen regulasi untuk program tak pergi seperti yang dijelaskan oleh informan RH:

“Kalau peraturan kepala desanya belum di finalkan. Baru rancangannya. Karena kami masih butuh referensi lain untuk menguatkan” (14/06/2023)

Peraturan desa yang menjadi landasan program tak pergi ini masih dalam proses pembahasan. Hal ini menandakan bahwa selain penetapan program tak pergi pada RKP Desa, belum ada regulasi lain yang menjadi landasannya. Hal ini menandakan bahwa program ini berpeluang untuk tidak di lanjutkan pada tahun – tahun berikutnya.

Dukungan publik kepada pemerintah desa menjadi hal yang penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan. Dukungan ini juga menjadi jaminan stabilitas kepemimpinan itu sendiri. Adapun dukungan masyarakat pada kepemimpinan kepala desa Biangloe seperti yang dijelaskan oleh warga Desa, PJ:

“Menurut saya pemerintahan Kepala Desa (Rais) sekarang ini sudah baik. Kita dukung program – program yang dijalankan” (12/06/2023)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa stabilitas pemerintah berjalan dengan dengan baik karena adanya dukungan masyarakat. Di mana masyarakat menganggap kepemimpinan kepala desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sekretaris Desa, RH:

“Sejauh ini tidak ada warga yang tidak mendukung inovasi ini. Karena beberapa tokoh masyarakat diundang untuk membahas manfaat dari inovasi ini. Jadi tidak ada yang menganggapnya buruk atau tidak bagus. Justru sebaliknya, inovasi ini mendapat dukungan. Jadi jika ada warga yang mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan, petanya dapat dibuka dan menampilkan nama-nama yang menerima bantuan” (14/06/2023)

Dukungan publik terhadap program pemerintah desa termasuk Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini berjalan dengan baik. Hal ini karena program yang dijalankan pemerintah desa termasuk program Tak Pergi ini berdampak positif bagi warga. Selain itu, sebagai pedoman pemerataan bantuan kepada warga desa biangloe. Stabilitas kepemimpinan juga ini sejalan dengan penjelasan Kepala Dusun Parangmuloroa, ZK:

“Saya sebagai masyarakat sangat mendukung membangun Desa. Karena untuk melihat Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Salah satu bentuk dukungan kami adalah jika ada aspirasi masyarakat seperti inovasi aplikasi ini perlu didiskusikan lebih lanjut” (09/06/2023)

Hal ini mengidentifikasi bahwa kepala Dusun dan warga mendukung kepemimpinan kepala desa dan mendukung program yang dijalankan termasuk didalamnya Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi). Dukungan kepemimpinan desa ini juga berasal dari pemerintah kabupaten. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RH:

“Dukungan dari pemerintah kabupaten sangatlah penting dan mereka sangat mengapresiasi upaya ini. Dalam lomba inovasi terakhir, desa kami, Biangloe, adalah satu-satunya yang berpartisipasi dari Kabupaten Bantaeng” (14/06/2023)

Dukungan dari pemerintah kabupaten juga semakin meningkat dengan diikutkannya program tak pergi ini sebagai satu satunya inovasi yang di usulkan untuk mengikuti lomba ditingkat Provinsi. Hal ini menandakan bahwa terjadi stabilitas kepemimpinan didesa biangloe yang memungkinkan inovasi berjalan dengan baik.

Pemimpin yang inovatif mampu menciptakan visi masa depan dan merumuskan strategi untuk mencapainya, termasuk cara mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan (Mahsud et al 2010, Goleman 2017, Attar & Abdul-Kareem 2020). Komitmen Kepemimpinan merujuk pada sejauh mana pemimpin berkomitmen pada inovasi, mendukung gagasan baru, dan berinvestasi dalam pengembangan dan implementasi ide-ide ini. Pemimpin yang berkomitmen terhadap inovasi biasanya mempromosikan budaya organisasi yang mendorong kreativitas, berpikir di luar kotak, dan berani mengambil risiko. Stabilitas Kepemimpinan merujuk pada kemampuan pemimpin untuk mempertahankan arah dan fokus strategis dalam jangka panjang, meski menghadapi tantangan dan hambatan (Snowden & Boone 2007, Judge et al 2009, Youssef & Luthans 2012). Pemimpin yang stabil mampu mempertahankan kebijakan inovasi dan melanjutkan upaya inovasi, bahkan dalam menghadapi perubahan atau ketidakpastian.

Program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) merupakan inisiatif strategis yang terintegrasi dengan perencanaan anggaran desa. Dalam hal ini, penganggaran untuk pembuatan dan operasional program disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai bagian dari perencanaan strategis, program ini juga telah melibatkan berbagai stakeholder seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang

membantu dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan program. Ini menunjukkan bahwa program ini telah direncanakan dan dieksekusi dengan cara yang strategis dan komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tampak bahwa kepemimpinan desa menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan program ini. Ini terlihat dari keterlibatan langsung kepala desa dalam proses perumusan dan penamaan program ini. Selain itu, anggaran yang telah disiapkan melalui APBDes menunjukkan komitmen finansial pemerintah desa untuk melaksanakan program ini. Namun, penelitian ini mencatat bahwa peraturan desa yang menjadi landasan hukum Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) masih dalam proses pembahasan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat kerangka hukum dan regulasi dari program ini.

Dukungan masyarakat yang kuat, sebagaimana disuarakan oleh Kepala Dusun Parangmuloroa, ZK, menunjukkan partisipasi dan dialog antara warga dan pemerintah desa, sebuah indikator vital dari stabilitas kepemimpinan. Ini diperkuat oleh dampak positif Program Tak Pergi, yang telah meningkatkan kepercayaan publik dan berfungsi sebagai pedoman dalam pemerataan bantuan. Tambahan pula, dukungan dari pemerintah kabupaten, yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RH, serta keikutsertaan Desa Biangloe dalam lomba inovasi di tingkat provinsi, menandakan tingkat kepercayaan dan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan. Semua faktor ini bersama-sama menegaskan adanya stabilitas kepemimpinan di Desa Biangloe, yang membuatnya kondusif untuk inovasi dan pengembangan berkelanjutan.

Kualitas Tim Kerja Program Inovasi Tak Pergi di Desa Biangloe Kabupaten Bantaeng

Kapasitas yang penting selanjutnya yang dimiliki dalam menjalankan inovasi yakni pada kualitas tim kerja. Kualitas tim kerja menurut Kim, et al (2007) yakni meliputi komitmen pegawai dan profesionalisme. Dalam hal pelaksanaan inovasi tak pergi ini, lebih menekankan pada perangkat desa dan orang yang dipercayakan menjalankan program ini.

Adapun dalam tim pelaksana program inovasi Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini dijalankan oleh aparat desa yang diberikan tanggung jawab. hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:

“Sampai saat ini, ada satu orang yang di tunjuk untuk menjadi operator dari aplikasi program tak pergi. Admin ini atas nama Aldi Alpianto masih menjabat sebagai operator berdasarkan keputusan (SK) pemerintah desa” (14/06/2023)

Hal ini menandakan bahwa untuk penanggung jawab utama sebagai operator ditunjuk oleh berdasarkan surat keputusan. Dimana operator tersebut memiliki pengalaman dalam pengelolaannya. Untuk mengoptimalkan pengerjaan sistem yang rumit, maka pengerjaannya dibantu oleh pihak diluar aparatur desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh sekretaris Desa Biangloe, RAH:

“Jadi ada satu orang di luar pemerintah desa yang terlibat sebagai operator, yaitu Aldi Alpianto. Sedangkan Dedi Aprianto merupakan Kepala Urusan Administrasi (KAUR) di desa tersebut. Aldi Alpianto adalah orang yang telah menjalani pelatihan selama tiga bulan dalam bidang teknologi informasi (IT) untuk mengurus inovasi ini. Selama tiga bulan, Aldi Alpianto telah dilatih dan mempersiapkan dirinya untuk mengelola inovasi tersebut” (14/06/2023)

Hal ini menunjukkan bahwa karena sistem yang dimiliki oleh Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital tergolong rumit maka dibutuhkan tenaga diluar operator untuk membantu menjalankan sistem ini. Adapun tenaga yang dilibatkan yakni yang memiliki pengalaman dan telah mengikuti pelatihan terkait IT. Sejauh ini memang yang mengelola program tak pergi ini tidak diragukan pengalaman dan komitmennya.

Adapun terkait profesionalisme pegawai dalam pengelolaan aplikasi inovasi tak pergi ini sudah berbasis nomor ID. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh DEA, Admin inovasi tak pergi:

“Aplikasi ini sangat memudahkan warga dalam mengakses informasi karena dalam aplikasi ini setiap rumah telah diberi nomor ID, dan ketika diklik akan diketahui letak rumah, berapa jumlah keluarga, bantuan apa yang pernah di terima” (16/06/2023)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pada program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini telah berbasis nomor ID untuk setiap rumah. Sehingga pendataan lebih detail dan profesional. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya juga belum optimal khususnya dalam pendataan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Warga Desa Biangloe, PAJ:

“Saya tidak mengetahui tentang aplikasi desa digital ini, yang saya tahu pernah dari perangkat desa datang untuk memfoto rumah saya, dan semua rumah difoto disini. Hanya saya tidak tahu apa tujuan dari foto rumah tersebut” (12/06/2023)

Pengetahuan masyarakat terkait aplikasi masih terbatas. Termasuk dalam proses pendataannya. Walaupun diakui telah dilakukan pengambilan data namun tidak dijelaskan peruntukannya untuk program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital. Kurangnya sosialisasi dan lemahnya penjelasan kepada masyarakat dalam pengambilan data disebabkan oleh belum adanya Standar operasional prosedur (SOP). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh DEA, Admin inovasi Tak Pergi:

“Sejauh ini belum ada regulasi maupun SOP terkait dari penggunaan aplikasi ini. Akan tetapi ada kesepakatan dalam menjaga data disamping upaya transparansi data maka hanya Admin yang dapat melakukan perubahan dan pembaharuan data” (16/06/2023)

Walaupun belum ada SOP, namun sudah ada kesepakatan Bersama dalam hal transparansi dan perubahan data. Walaupun dalam pengambilan datanya belum ada pengaturan khusus, sehingga memungkinkan adanya ketidakpahaman warga. Adapun yang bertanggung jawab menyebarkan informasi dan sosialisasi program Tak Pergi ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Biangloe, RAH:

“Jadi, dalam upaya pemerintah desa untuk menyebarkan informasi terkait ini, kami bekerja sama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD bertanggung jawab untuk menggali aspirasi masyarakat. Kami meminta BPD untuk menyampaikan informasi ini dan menyebarkannya ke setiap dusun” (14/06/2023)

Adapun dalam mensosialisasikan sekaligus menggali aspirasi masyarakat termasuk didalamnya program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini menjadi tanggung jawab BPD. Selanjutnya mereka menyampaikan informasi ini ke setiap dusun. Adapun untuk menjaga kualitas dan memastikan keberlanjutan program ini dilakukan dengan evaluasi secara rutin. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:

“Diawal itu per 6 bulan kita evaluasi. Sekarang ini kita karena anggap berkembang ini inovasi kita ambil lagi pertahunnya. Setiap tahun itu kita evaluasi dan dievaluasi itu di hadapan BPD dan masyarakat. Itu pada saat MUSREMBANG. Ini kan sebetulnya kan di saat MUSREMBANG itu kan kita mengundang masyarakat. Itu yang kita manfaatkan. Disitu kita tampilkan lagi perubahan setiap tahunnya” (14/06/2023)

Evaluasi terkait program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital awalnya dilakukan 6 bulan sekali. Namun karena sudah berjalan maka evaluasi dilakukan saat Musrembang dengan melibatkan BPD dan perwakilan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan program ini berjalan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, meski belum ada SOP khusus, adanya kesepakatan bersama dalam hal transparansi dan perubahan data menunjukkan upaya profesionalisme dalam pengelolaan program. Selain itu, evaluasi rutin yang dilakukan setiap tahun juga menjadi bukti profesionalisme tim kerja dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan program ini. Ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa tingkat profesionalisme dapat berkontribusi pada kualitas inovasi seperti Holliman (2012) dan Suzuki & Demircioglu (2017), dan diikuti oleh Yohana (2020) dan Bugge & Siddiq (2021), kesemuanya sepakat bahwa profesionalisme yang lebih tinggi cenderung mengajukan ide atau desain yang berkualitas lebih tinggi. Kualitas tim kerja program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital di Desa Biangloe Kabupaten Bantaeng sudah cukup baik ditinjau dari aspek komitmen dan profesionalisme. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pembuatan SOP untuk pengelolaan program ini.

Sistem/Struktur

Sistem/struktur dalam kapasitas inovasi meliputi struktur tim, sistem berbagi pengetahuan, sistem pengahrgaan, sistem evaluasi/umpan balik. Dalam hal pemerintah desa, instrument sistem dan struktur menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Adapun tim pelaksana dari program inovasi tak pergi ini, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Biangloe, RAH:

“Pengelola Inovasi Tak Pergi ini masuk di bidang pemerintahan. Kemudian sub bidangnya itu adalah profil desa. Jadi masuk di sub bidang profil desa. Kalau terkait

spesifik soal inovasinya itu belum ada. Di APB Desa itu gabungi masuk di profil desa” (14/06/2023)

Pengelolaan Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini berada dalam naungan badan pemerintahan khususnya pada sub bidang profil Desa. Dalam pengelolaan sistem pada Program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini tidak dibentuk tim khusus. Namun pada pendataan dibentuk tim yang melibatkan pemuda Karang Taruna dan Komunitas pemuda yang ada di desa Biangloe.

Sementara itu, dalam hal sistem berbagi pengetahuan yang ada pada program inovasi Tak Pergi ini dianggap memiliki manfaat dan sinkronisasi dengan SDGS Desa yang dimiliki Kementerian Desa dan PDTT. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Pendamping Desa, SUK:

“Aplikasi ini tentu sangat bermanfaat, kami dari pendamping mengkolaborasi antara gagasan perencanaan pembangunan berbasis digital dengan perencanaan berbasis SDGs, Pemerintah melalui kementerian desa menerbitkan permendes 2020 tentang pedoman umum perencanaan pembangunan di desa yang arah kebijakannya adalah pembangunan desa berbasis data SDGs. Hal inilah yang diakomodir oleh kepala desa bahwa pembangunannya berdasarkan data” (03/07/2023)

Keberadaan aplikasi ini dapat dikolaborasi dengan data SDGs Desa. Serta dapat mendukung arah kebijakan dan perumusan program di Desa Biangloe berbasis data. Program ini juga melakukan berbagai pertukaran pengetahuan dengan tenaga Kesehatan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bidan Desa, NAR:

“Selain letak rumah, kami bisa data mengenai penyakit dalam keluarga itu. Saya sangat terbantu, buktinya selama minggu ini saya telah menggunakan tiga kali”

Keberadaan aplikasi Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital sangat membantu kerja - kerja tenaga Kesehatan khususnya bidan desa. Dimana aplikasi ini dapat memetakan jenis penyakit warga desa. Keberadaan inovasi ini juga membantu mengidentifikasi sebaran masyarakat miskin. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dusun Parangmuloroa, ZAK:

“Sangat membantu karena didalam aplikasi ini diberi tanda yang jelas misalnya penduduk yang tergolong miskin memiliki warna ini sehingga dalam program bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah ini akan menjadi sasaran” (09/06/2023)

Aplikasi Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi masyarakat miskin yang memudahkan dalam perumusan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perumusan dan pembuatan aplikasi program inovasi tak kerja melibatkan berbagai pihak. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:

“Dari awal kami melibatkan kecamatan, dari awal inovasi ini dibuat. Kemudian kami juga melibatkan kak Rahman Ramlan yang di Bantaeng institut itu untuk memeriksa redaksi proposal inovasi ini. Jadi dari awal kita melibatkan banyak orang. Termasuk

pemerintah kabupaten. Setelah selesai ikut lomba inovasi tidak lagi melibatkan kecamatan dan kabupaten. Karena kita ini mau mengelola data sendiri” (14/06/2023)

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal perumusan inovasi ini sudah melibatkan berbagai pihak. Mulai dari Non-governmental organization, Pemerintah kecamatan hingga pemerintah kabupaten. Hal ini membuktikan bahwa inovasi ini menerapkan sistem berbagi pengetahuan sejak awal perumusannya. Adapun dalam pembuatannya, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:

“Dalam pembuatan aplikasinya, perangkat desa terlibat dalam proses perancangan. Namun, mereka tidak membuat masternya sendiri. Dalam hal teknis, aplikasi ini dibuat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (GIS) oleh Pak Anto. Pak Anto juga bertanggung jawab melatih mereka dalam penggunaan aplikasi tersebut” (14/06/2023)

Pembuatan aplikasi ini berbasis GIS dengan melibatkan pihak ketiga. Namun dalam pembuatannya perangkat desa terlibat, termasuk di dalamnya dilatih untuk mengelola aplikasi tersebut.

Adapun dalam hal sosialisasi dan umpak balik, sejauh ini lebih dibutuhkan pemahaman warga. Walaupun demikian pemerintah desa optimis hal ini bisa pahami masyarakat desa nantinya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh DEA, Admin inovasi tak pergi:

“Untuk sosialisasi aplikasi masih sebatas perangkat desa, kedepannya jika telah siap akan disosialisasikan kepada seluruh warga Desa Biangloe. Saya kira penggunaannya dapat optimal, dikarenakan setiap rumah tangga dikampung ini telah memiliki handphone kecuali dalam keluarga itu hanya ditinggali oleh orang yang berumur tua” (16/06/2023)

Keterbatasan sosialisasi yang masih di dominasi oleh perangkat desa membuat penyebaran informasi dan manfaatnya belum dirasakan semua warga. Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh Warga Desa, PAJ:

“Saya tidak pernah mendapatkan informasi dari perangkat desa tentang desa digital tersebut” (12/06/2023)

Penjelasan warga ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum massif dilakukan ke masyarakat umum. Namun demikian, pemerintah desa optimis karena umumnya warga telah memiliki handphone. Pemahaman masyarakat pun masih butuh penjelasan lebih lanjut.

Untuk masyarakat umum, dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam dengan penjelasan yang lengkap sehingga mudah dipahami. Kapasitas inovasi dalam hal sistem/struktur yang sama sekali belum ditemukan dalam inovasi program tak pergi ini yakni pada sistem penghargaan. Dimana penghargaan terhadap operator, aparatur, mitra maupun masyarakat sama sekali belum dibahas dan disiapkan dalam desain program ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam kapasitas inovasi, belum ditemukan adanya sistem penghargaan dalam program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital. Penghargaan terhadap operator, aparatur, mitra

maupun masyarakat sama sekali belum dibahas dan disiapkan dalam desain program ini. Pentingnya mempertimbangkan sistem penghargaan dalam upaya mendukung inovasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan oleh Zhou (2009) dan Nacinovic et al (2009), serta Kanama & Nishikawa 2017 yang juga disinggung oleh Khan et al (2020) masing-masing dari mereka menyatakan bahwa meskipun sistem penghargaan tidak dapat sepenuhnya mendorong inovasi secara mandiri, mereka merupakan bagian penting dari ekosistem yang mendukung inovasi dan dapat berperan penting dalam membentuk motivasi dan perilaku anggota tim. Namun, pengetahuan masyarakat terkait aplikasi ini masih terbatas, sehingga sosialisasi yang lebih masif dan mendalam diperlukan untuk memastikan penggunaan dan manfaat aplikasi ini dapat optimal. Hal ini juga menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pengelolaan Pengaruh dari Luar

Kapasitas inovasi dalam hal pengelolaan pengaruh dari luar meliputi dukungan politik untuk anggaran dan kemampuan pengelolaan jaringan. Dalam prakteknya pada program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini, pemerintah Desa Biangloe masih mengandalkan anggaran yang bersumber pada ABPDesa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:

“Seluruh anggaran program inovasi Tak Pergi ini bersumber dari APBDesa baik pembuatan maupun operasionalnya. Sejauh ini juga semua elemen masyarakat mendukung penganggaran tersebut” (14/06/2023)

Hal ini menandakan bahwa dukungan politik terhadap anggaran program aplikasi tak kerja di tingkat desa sangat kuat. Bahkan sejauh ini pihak mendukung. Hal ini sejalan dengan penjelasan ketua BPD Biangloe, NAS:

“Kami sebagai BPD tentunya sangat mendukung program ini termasuk penganggarnya. Kan ini sudah merupakan juga contoh ke desa lain” (13/07/2023)

Hal ini menandakan bahwa dukungan politik untuk penganggaran didesa tidak menjadi kendala. Dimana BPD menganggap keberadaan inovasi ini tidak hanya bermanfaat untuk warga desa, namun juga jadi percontohan untuk desa lainnya.

Adapun dalam hal manajemen jaringan sejauh ini sudah berjalan, bahkan beberapa pihak telah intens berkomunikasi untuk penggunaan data ini. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh NAS, Ketua BPD:

“Pemerintah kabupaten sangat mendukung terutama dari dinas DUKCAPIL, kesehatan dan pertanian. Seringkali datang untuk berdiskusi dan menggunakan data ini untuk sinkronisasi” (13/7/2023)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa beberapa institusi di tingkat kabupaten intens melakukan sinkronisasi data dan berdiskusi khususnya Dinas catatan sipil (DUKCAPIL), Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Mereka sangat terbantu dengan adanya data yang akurat dari inovasi ini. Hal ini juga sejalan dengan kemanfaatan data tersebut pada tenaga Kesehatan. Seperti yang dijelaskan oleh Bidan Desa, NAR:

“Kami sangat terbantu dan sering menggunakan aplikasi ini dalam menjalankan tugas. Seperti, mengetahui letak rumah. Adanya aplikasi ini kita dapat menjangkau rumah pasien dengan cepat”

Inovasi tak pergi ini membuat tenaga Kesehatan mudah mengetahui rumah pasien yang akan ditangani. Termasuk didalamnya juga jenis penyakit yang diderita. Walaupun demikian, pemanfaatan ini masih bersifat koordinasi informal karena belum adanya kerjasama resmi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bidan Desa, NAR:

“Penggunaan aplikasi ini oleh bidan dan puskesmas belum ada SK dan perjanjian tertulis” (05/07/2023)

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada Morandum of Understanding antara pemerintah desa dengan pihak puskesmas maupun pihak lainnya. Sehingga kerjasama yang dilakukan masih membutuhkan hubungan emosional antar semua pihak. Oleh karena itu diharapkan kedepan adanya kerjasama antar berbagai pihak dalam penggunaan data ini, serta sinkronisasi dengan pemerintah di level atas. Hal ini juga sejalan dengan harapan Pendamping Desa, SUK:

“Saya berharap pemerintah pusat melalui kementerian desa dapat memberikan payung hukum kepada pemerintah desa agar arah pembangunannya berbasis SDGs sehingga pemerintah desa dapat melakukan pemuktahiran desa setiap 6 bulan sekali berbasis data SDGs atau 2 kali setahun pada dashboardnya masing-masing. Data ini juga dapat sinkron dengan aplikasi inovasi tak pergi ini” (03/07/2023)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam mengelola jaringan butuh dukungan regulasi dan kerjasama tertulis antar institusi. Hal ini agar pengelolaannya lebih profesional dan potensi penyalahgunaan data ini dapat dihindarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, program ini mendapat dukungan politik yang kuat terutama terkait dengan penganggaran. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBDesa, dan seluruh elemen masyarakat mendukung penganggaran tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan politik dalam memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk inisiatif semacam ini. Hal ini sesuai pendapat Thompson & Purdy (2009) serta Courvisanos (2009) yang menyatakan bahwa meskipun struktur organisasi dan faktor teknis tentu penting, tanpa dukungan politik yang tepat, inovasi akan sulit untuk diimplementasikan dan dipertahankan, terutama dalam konteks organisasi yang dinamis dan kompleks. Walau demikian, perlu diperhatikan bahwa belum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian resmi antara pemerintah desa dengan pihak puskesmas dan pihak lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam aspek formalisasi kerjasama dan peningkatan perlindungan data. Regulasi dan kerjasama resmi juga dapat memfasilitasi peningkatan profesionalisme dan meminimalisir potensi penyalahgunaan data.

Kesimpulan

Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng, adalah manifestasi nyata dari konsep kepemimpinan inovatif. Elemen-elemen seperti perencanaan strategis, komitmen kepemimpinan, dan stabilitas kepemimpinan tidak hanya ada tetapi juga aktif dalam pelaksanaan program ini. Ini dibuktikan oleh alokasi anggaran yang khusus dari APBDes dan konsensus antara pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Namun, meski telah mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat dan pemerintah kabupaten, program ini masih memerlukan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin keberlanjutannya.

Peraturan kepala desa yang saat ini masih dalam tahap pembahasan adalah komponen penting yang perlu diselesaikan untuk memperkuat landasan hukum dan efektivitas program. Keberhasilan dan keberlanjutan Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) akan sangat bergantung pada selesainya peraturan tersebut dan pada terus berlanjutnya komitmen dari kepemimpinan desa. Kepemimpinan inovatif berperan penting tidak hanya dalam penciptaan tetapi juga dalam implementasi dan keberlanjutan inovasi. Ini juga memvalidasi pentingnya Kepemimpinan Inovatif sebagai salah satu dimensi kritis dalam model kapasitas inovasi pemerintah.

Kualitas tim kerja dalam pelaksanaan Program Inovasi Tak Pergi di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng ditandai dengan adanya komitmen dan profesionalisme pegawai. Tim kerja terdiri dari operator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan dan memiliki pengalaman yang relevan, serta perangkat desa yang berpengalaman dan berkomitmen tinggi. Evaluasi juga dilakukan secara rutin untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program ini. Namun, pengetahuan masyarakat tentang program ini masih terbatas, yang menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Perlu ada peningkatan dalam hal regulasi dan kerja sama resmi antar pihak untuk menghindari potensi penyalahgunaan data dan memastikan pengelolaan program ini lebih profesional.

Referensi

- Abdullah, M. T. (2020). *Menyoal Inovasi Pemerintah Daerah*. Makassar: Unhas Press.
- Attar, M., & Abdul-Kareem, A. (2020). *The Role of Agile Leadership in Organisational Agility*. In *Agile Business Leadership Methods For Industry 4.0*. Leeds: Emerald Publishing Limited
- Bartos, S. (2003). Creating and Sustaining Innovation. *Australian Journal of Public Administration*, 62(1), 09-14.
- Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2013). Performance-Based Public Management Reforms: Experience And Emerging Lessons From Service Delivery Improvement In Indonesia. *International Review of Administrative Sciences*, 79(3), 433-457.
- Bugge, M. M., & Siddiq, F. (2021). Empowering Professionalism in Mission-Oriented Innovation. *Science and Public Policy*, 48(3), 423-437.

- Choi, N., & Majumdar, S. (2015). Social Innovation: Towards A Conceptualisation. In S.Majumdar, S.Guha, and N.Marakkath (Eds). *Technology and Innovation for Social Change*, 7-34.
- Courvisanos, J. (2009). Political Aspects of Innovation. *Research Policy*, 38(7), 1117-1124.
- Darmi, T. (2015). *Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam Perspektif Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa*. Disertasi Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
- Gabris, Gerald T., Kimberly Nelson, and Curtis H. Wood. (2009). *Managing for Innovation in Local Government: Three Core Strategic Factors*. The Radford University Governmental and Nonprofit Assitency Centre.
- Gargan, J. J. (2018). The Public Administration Community and the Search for Professionalism. *Handbook of Public Administration* (pp. 1125-1204). Routledge.
- Goleman, D. (2017). What Makes a Leader?(Harvard Business Review Classics). Harvard Business Press.
- Grindle, M.S. (1997). *Getting Good Government Capacity Building In The Public Sector Of Developing Countrie*, Boston, MA: Harvard Institute for International Development
- Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Røste, R. (2005). Innovation in the Public Sector on the Differences Between Public and Private Innovation. PUBLIN research project. <https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/226535/d9differences.pdf?sequence=1>
- Holliman, S. L. (2012). *Exploring The Effects of Empowerment, Innovation, Professionalism, Conflict, and Participation on Teacher Organizational Commitment*. Doctoral dissertation, The University of Iowa
- Judge, T. A., Piccolo, R. F., & Kosalka, T. (2009). The Bright and Dark Sides of Leader Traits: A Review and Theoretical Extension of The Leader Trait Paradigm. *The Leadership Quarterly*, 20(6), 855-875.
- Kanama, D., & Nishikawa, K. (2017). Does an extrinsic reward for R & D employees enhance innovation outcomes? Evidence from a J apanese innovation survey. *R&D Management*, 47(2), 198-211.
- Khan, K. I., Naqvi, S. M. W. A., Ghafoor, M. M., & Nayab, G. (2020). Effect of Reward System on Innovative Work Behaviour Through Temporary Organizational Commitment and Proficiency: Moderating Role Of Multiculturalism. *International Journal of Management Research and Emerging Sciences*, 10(2).
- Kim, J. Y. (2007). SME innovation policies in Korea. The Policy Environment for the Development of SMEs. PEEC, 129-150.
- Mahsud, R., Yukl, G., & Prussia, G. (2010). Leader empathy, ethical leadership, and relations-oriented behaviors as antecedents of leader-member exchange quality. *Journal of Managerial Psychology*, 25(6), 561-577.
- Manor, J. (2000). Small-Time Political Fixers in India's States:" Towel over Armpit". *Asian Survey*, 40(5), 816-835.
- Mathew, G. (2013). Decentralisation and Local Governance in India. Panorama: Insights into Asian and European Affairs is a series of occasional papers published by the Konrad-Adenauer-Stiftung's "Regional Programme Political Dialogue Asia/Singapore" ., 71.

- Merhi, M. I. (2022). An assessment of the barriers impacting responsible artificial intelligence. *Information Systems Frontiers*, 1-14.
- Mulgan, G., & Albury, D. (2003). Innovation In The Public Sector (Nomor October).
- Nacinovic, I., Galetic, L., & Cavlek, N. (2009). Corporate culture and innovation: Implications for reward systems. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 53, 397-402.
- Ndou, V. (2004). E-government for developing countries: Opportunities and challenges. *Electron. Journal of Information System Developemnt Countries.*, 18(1), 1-24.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makassar: De La Macca.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahayu, A. B., & Budi, A. (2006). *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Iskandar Institute.
- Rakova, B., Yang, J., Cramer, H., & Chowdhury, R. (2021). Where Responsible AI Meets Reality: Practitioner Perspectives On Enablers For Shifting Organizational Practices. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW1), 1-23.
- Regan, Á. (2021). Exploring The Readiness of Publicly Funded Researchers to Practice Responsible Research and Innovation in Digital Agriculture. *Journal of Responsible Innovation*, 8(1), 28-47.
- Robbins, S., Judge, T. A., Millett, B., & Boyle, M. (2013). *Organisational Behaviour*. Pearson Higher Education AU.
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion Of Innovations. In *An Integrated Approach To Communication Theory And Research* (pp. 432-448). London: Routledge.
- Said, M. (2015). Capacity Development Of Human Resource In Local Government To Improve Public Service Quality. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 8-13.
- Sangkala. (2013). *Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Surabaya: Capiya Publishing
- Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A Leader's Framework For Decision Making. *Harvard Business Review*, 85(11), 68.
- Speer, J. (2012). Participatory Governance Reform: A Good Strategy For Increasing Government Responsiveness And Improving Public Services?. *World Development*, 40(12), 2379-2398.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(02), 271-288.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Suzuki, K., & Demircioglu, M. A. (2017). *Rediscovering Bureaucracy: Bureaucratic Professionalism, Impartiality, and Innovation*. Working Paper Series 2017:7. The

- Quality of Government Institute. Department Of Political Science. University Of Gothenburg
- Thompson, T. A., & Purdy, J. M. (2009). When A Good Idea Isn't Enough: Curricular Innovation As A Political Process. *Academy of Management Learning & Education*, 8(2), 188-207.
- UNDESA. 2006. *Innovations in Governance and Public Administration: Replicating What Works*. New York: United Nations Publication.
- Wolf, S. H., Zimmerman, E., Haley, A., & Krist, A. H. (2016). Authentic Engagement of Patients And Communities Can Transform Research, Practice, and Policy. *Health Affairs*, 35(4), 590-594.
- Yogi, I. (2016). *Analisa Strategi Inovasi Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Fasilitas Dengan Menggunakan Metode Teds (Total Evaluation And Decision Square) Studi Kasus pada Fakultas Teknik Universitas Andalas*. Doctoral Dissertation. Universitas Andalas.
- Yohana, C. (2020). The effect of integrity, professionalism, and innovation on service performance. *Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship*, 4(1), 26-42.
- Youssef, C. M., & Luthans, F. (2012). Positive Global Leadership. *Journal of World Business*, 47(4), 539-547.
- Yudarwati, G. A., & Gregory, A. (2022). Improving Government Communication And Empowering Rural Communities: Combining Public Relations And Development Communication Approaches. *Public Relations Review*, 48(3), 102200.
- Zhou, Y., Zhang, Y., & Montoro-Sanchez, Á. (2009). How Do The Reward Approaches Affect Employees'innovative Behaviors?--An Empirical Study In Chinese Enterprises. *Academy of Management Proceedings* 1: 1-6.